

Penjabaran Demokrasi Ekonomi

DOSEN: NGADIYONO, S.Pd, M.Pd

Kelompok 6

1

Yanuar Habib N.I
15804241002

4

Estri Utami
15804241051

2

Hidayatur Roihana
15804241033

5

Nizami Inayati
15804244006

3

Ais Intan Islamiati
15804241034

6

Maya Mashita Fardany
1417200021

Pendahuluan

“Sesuai pasal 33 UUD 45, perekonomian Indonesia berdasar asas demokrasi ekonomi”.

Pembangunan ekonomi didasarkan pada **demokrasi ekonomi** dan merupakan bagian integral pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencangkup di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan, dan bertujuan untuk mewujudkan suatu **masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila**

Pasal 33 UUD 45 menyatakan :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

(2) Cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara

Dalam demokrasi ekonomi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Untuk itulah dibuatlah undang-undang agar pemilikan langsung dan penguasaan oleh pemerintah.



Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang diperbolehkan dikuasai orang seorang dan bermotivasi memperoleh laba.





Demokrasi Indonesia menghendaki setiap warga hidup layak dan memilih pekerjaan yang dikehendakinya.

Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan pemerintah sebagai lembaga pengawas.

Pasal 34 UUD 1945, menyatakan



Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam kata lain menghapuskan kemiskinan absolut.

Demokrasi ekonomi menghindarkan atas sistem liberalisme, sistem etatisme, dan peng-eksplotasi-an. Dalam rangka itu, para pelaku ekonomi baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha koperasi, diakui haknya menentukan sendiri penggunaan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Pemanfaatan hak ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.





Pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku ekonomi dikendalikan pemerintah secara tidak langsung terutama dengan sistem intensif dan dis-intensif dan tidak melalui sistem komando. Dan menghindari perusahaan yang berusaha memonopoli.

Pendekatan Penjabaran

Penjabaran demokrasi ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia

Penjabaran demokrasi ekonomi dalam bentuk program-program pelaksanaannya

Sistem Ekonomi Berdasarkan Demokrasi Ekonomi

1

Kelembagaan
Ekonomi

2

Perangkat
Kebijaksanaan

3

Pola Pemanfaatan
Sumber Daya

4

Distribusi
Pendapatan

5

Proses
Pengambilan
Keputusan

6

Sistem Insentif

Kelembagaan Ekonomi



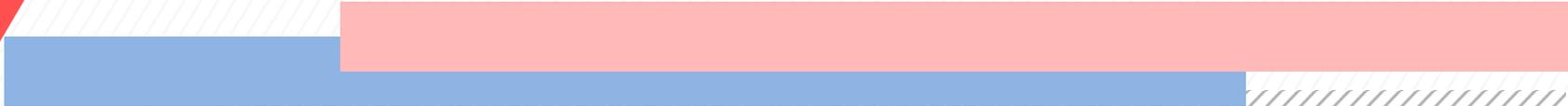
Dalam sistem ekonomi demokrasi ekonomi terdapat 3 bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta, yang saling berinteraksi

Di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Pemerintah wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang-seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat, dan sebaliknya wajib mengusahakan agar semua satuan usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama.

Di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakekatnya masing-masing.

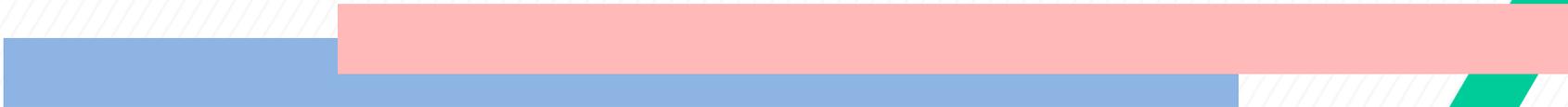
Usaha negara berperan sebagai:

- a) Perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta.
- b) Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara.
- c) Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- d) Pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi.
- e) Penjunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara.



Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahannya dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahannya dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Pemerintah perlu pula memberi perhatian pada lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyarakat seperti konsumen, rumah tangga, dan serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan wadah penting bagi para pekerja sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja





Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, hubungan antara para pelaku ekonomi bersifat saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan dan atas asas kekeluargaan.

Perangkat Kebijakan

Dalam perekonomian Indonesia, yang pada dasarnya merupakan ekonomi pasar terkendali, perangkat kebijakan ekonomi terutama mempunyai fungsi untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan stabilitas ekonomi yang mantap serta terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, peranan anggaran negara sangat menentukan dan digunakan oleh Pemerintah untuk maksud-maksud :

- a) Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan
- b) Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan
- c) Kebijakan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi
- d) Penyediaan pelayanan dasar pemerintahan bagi masyarakat



Prinsip anggaran belanja berimbang dan dinamis merupakan salah satu perangkat utama sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang keandalannya telah terbukti.

Kebijakan ekonomi makro tersebut dilengkapi dengan kebijakan ekonomi mikro yang diarahkan pada bekerjanya mekanisme pasar yang sehat. Salah satu kebijakan pokok dibidang ekonomi mikro yang dilaksanakan Pemerintah adalah kebijakan pembentukan harga yang wajar di pasar.

Pola Pemanfaatan Sumber Daya



Sumber daya masyarakat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan bersama.

Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki bahwa di dalam sistem mutu yang memadai tersebar anrata sektor dan daerah. Untuk itu, pemerintah menciptakan sistem untuk meningkatkan minat dan penyediaan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sektor dan daerah yang kurang diminati.



Pemerintah mengarahkan dan menciptakan iklim agar penanaman modal disamping menunjang sasaran pemerataan dan stabilitas serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, Pemerintah menciptakan insentif untuk mendorong penanaman modal swasta ke daerah dan ke bidang-bidang yang penting dilihat dari segi pembangunan nasional.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya, Pemerintah mengarahkan pemanfaatan aset yang tidak berwujud khususnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tersebar ke semua daerah.

Distribusi Pendapatan

- Sistem ekonomi yang diutamakan kemakmuran masyarakat dan semua orang
- Demokrasi ekonomi menghendaki perbedaan-perbedaan di dalam tingkat pendapatan namun masih dalam batas kewajaran
- Sistem ekonomi, prioritas utamanya adalah upaya penghapusan kemiskinan absolut
- Kebijakan pemerataan pendapatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam produktif dan redistribusi pendapatan
- Sistem ekonomi demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dengan cara pemerataan dalam pemilikan aset
- Fasilitas umum juga diratakan

Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka

Dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai peran yang saling mengisi

Proses kebijakan ekonomi berlangsung secara transparan

Sistem Insentif

Digunakan sistem insentif untuk merangsang anggota masyarakat berprestasi

Dalam demokrasi ekonomi, motif laba merupakan insentif untuk berprakarsa berusaha dan mengambil resiko

Kepada karyawan diberikan insentif supaya selalu berusaha meningkatkan produktivitas, yang sesuai dengan prestasi

Tabungan masyarakat mutlak perlu ditingkatkan

Sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi masyarakat diberikan insentif supaya ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang

Program Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi



Pemantapan sendi-sendi sistem yang berlandaskan demokrasi ekonomi ada beberapa program



Pemantapan Dan Pengembangan Demokrasi Pancasila :

Praktek konstitusional dan demokrasi yang sekarang telah berjalan terus dimantapkan

Penanaman nilai-nilai dan sikap demokratis dan prakteknya

Mutu infrastuktur politik terus dimantapkan

Pendidikan politik rakyat terus ditingkatkan

Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara :

Peningkatan efisiensi aparatur negara juga diiringi peningkatan efisiensi pengelolaan usaha negara

Pemerintah punya peran penting sebagai penunjang kepentingan umum/ penjamin keadilan dan kemakmuran bersama

Aparatur yang efektif dan mekanisme pasar yang berjalan baik adalah 2 unsur utama dari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi

Langkah-langkahnya :

Deregulasi dan
debirokratisasi

Aparatur pemerintah
dibenahi dan disempurnakan

Adanya pengaturan kembali



3. Program Pembaharuan Hukum :
Hukum harus dapat menampung dinamika di
bidang ekonomi dan yang andal



Bidang-bidang yang perlu diberikan pemantapan dan pembaharuan hukum :

- a. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur langsung manusia sebagai subjek dan objek kegiatan ekonomi.
 - b. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur transaksi ekonomi dan institusi ekonomi.
 - c. Proses penyelesaian hukum yang cepat dan adil perlu diupayakan agar hukum lebih mampu melayani gerak kehidupan ekonomi yang semakin cepat dan kompleks.
- 



**Program
Peningkatan
Kualitas Manusia**



Demokrasi Ekonomi erat kaitannya dengan Demokrasi Politik. Tingkat kemampuan berpartisipasi di bidang politik sangat ditentukan oleh tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh. Oleh karena itu, pembaharuan di Bidang Pendidikan merupakan salah satu sendi utama dalam pemantapan Demokrasi Ekonomi.

**Pada Asasnya, Mutu Pendidikan Perlu
Terus Ditingkatkan Dengan Prioritas
Sebagai Berikut :**

Pendidikan Dasar dan
Menengah

Pendidikan Keterampilan

Pendidikan Tinggi



Program Pemerataan Pembangunan

Empat bidang strategis untuk mendukung Delapan Jalur Pemerataan :



- a. Pemantapan Mekanisme Anggaran Negara
- b. Pengembangan Koperasi
- c. Perluasan kesempatan kerja
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat



Peranan pemerataan dari negara mutlak perlu ditingkatkan karena peranan ini tidak dapat dialihkan kepada swasta. Sistem pemberian Dana Bantuan Daerah dalam bentuk proyek-proyek INPRES merupakan sarana paling efektif bagi pemerataan pembangunan dan menyebarkan pelayanan umum. Selain itu setiap daerah bisa menggali sumber pendapatan sendiri untuk membiayai proyek pembangunan di daerah.



Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Koperasi berbasis kekeluargaan dan kebersamaan harus melandasi kehidupan ekonomi di negara kita.

“Bersaing secara sehat di dalam suatu keluarga”

Berartikan tanggung jawab sosial.

Dari segi pemantapan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi koperasi merupakan salah satu wahana utama, terutama pelaku-pelaku kecil untuk dapat berpartisipasi penuh dan lebih mantap dalam kegiatan ekonomi.

Langkah-langkah untuk megembangkan Koperasi mencakup :

- a. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan yang menghambat pembentukan koperasi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama,
- b. Dukungan pelatihan bagi para manajer dan pegawai koperasi serta penyediaan informasi mutakhir mengenai cara menjangkau pasar, perbankan, dan sebagainya,

- c. Pengkaitan koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kaitan usaha melalui pemilikan saham dan hubungan bapak angkat
- d. Dukungan bagi pengembangan koperasi karyawan di perusahaan-perusahaan.

Di tahun mendatang, masalah perluasan kesempatan kerja akan semakin mendesak, langkah-langkah penting di bidang ini mencakup :

1

Diusahakannya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

2

Diusahakannya pertumbuhan ekspor non-migas yang tinggi karena sifat padat karya dari komoditi-komoditi ini

3

Peningkatan mobilitas tenaga kerja antar daerah melalui pembangunan infrastruktur dan transmigrasi

4

Pembinaan kegiatan-kegiatan sektor informal

5

Penentuan upah minimum yang rasional, sederhana dan sesuai dengan kondisi setempat

6

Pengembangan sistem hubungan industrial Pancasila dan penyempurnaan penerapannya.



**Program Untuk Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi yang Cukup Tinggi**

Prioritas tinggi perlu diberikan pada tiga bidang strategis, yaitu :

- 
- a. Penciptaan iklim berusaha yang sehat,
 - b. Peningkatan Tabungan Nasional,
 - c. Peningkatan kemampuan Nasional di Bidang Teknologi.

Dalam sistem ekonomi yang didasarkan atas Demokrasi Ekonomi yaitu sistem ekonomi pasar terkendali perlu terus dikembangkan iklim berusaha agar dapat :

- //////////
- a. Menggairahkan kegiatan dunia usaha,
 - b. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pengusaha,
 - c. Memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

Persaingan yang sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru dan perluasan pasar ekspor.



Persaingan yang tidak sehat adalah persaingan yang bertujuan untuk mematikan saingan dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara.





Kebijaksanaan untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat dalam demokrasi ekonomi mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Deregulasi dan debirokratisasi diberbagai bidang dilanjutkan dan ditingkatkan.
 - b) Kerja sama yang sehat antara usaha negara , koperasi dan usaha swasta serta antara usaha besar, menengah dan kecil.
 - c) Kemampuan usaha-usaha kecil untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang telah ada perlu terus dikembangkan.
 - d) Perlu dilakukan pemantauan yang intensif terhadap gejala-gejala persaingan dan kerjasama yang tidak sehat dalam dunia usaha.
- 

Unsur- Unsur Penting Bagi Strategi Peningkatan Tabungan Nasional Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Sistem perpajakan yang adil dan efisien yang dapat meningkatkan tabungan pemerintah dan sekaligus tabungan masyarakat.
- 2) Stabilitas ekonomi yang mantap mempunyai peranan sentral dalam menciptakan iklim yang merangsang gairah masyarakat untuk menabung.
- 3) Pengembangan sektor perbankan, lembaga-lembaga keuangan dan pembiayaan serta pasar modal yang mantap juga sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan tabungan masyarakat
- 4) Pinjaman luar negeri, baik untuk negara maupun swasta perlu terus dipantau agar tidak melampaui batas kemampuan perekonomian untuk membayarnya nkembali.

Program Pemantapan Stabilitas Ekonomi



Salah satu landasan kebijaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijaksanaan ekonomi makro (fiskal, moneter, neraca pembayaran) yang berhati-hati. Ekonomi Indonesia telah dapat tumbuh secara berkesinambungan karena pertumbuhan disertai dengan stabilitas yang tetap terkendali.

Pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup



Bahwa kelestarian kemampuan sumber alam untuk mendukung peningkatan kemakmuran tersebut serta mutu lingkungan hidup yang dihasilkan harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan. Dengan tepat dikatakan bahwa pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Penutup

Pelaksanaan dan pemantapan demokrasi ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Dengan demikian program-program pelaksanaan demokrasi ekonomi tertuang dalam strategi pembangunan berjangka panjang, dalam repelita-repelita, dalam rencana-rencana tahunan dan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan.

Sumber: ISEI (1990). Penjabaran Demokrasi Ekonomi